

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan salah satu diantaranya adalah dalam hal penyediaan sumber pembiayaan pembangunan itu sendiri. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri merupakan pilihan utama untuk pembiayaan pembangunan. Namun sumber penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan migas, serta penerimaan dalam negeri lainnya belum cukup untuk membiayai pembangunan sesuai target pertumbuhan yang diinginkan.

Saat ini pemerintah Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan dari migas, sehingga harus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak. Menyadari betapa pentingnya peranan pajak bagi pembangunan nasional, pemerintah harus menyadari perekonomian yang tumbuh dengan cukup signifikan akan berdampak terhadap pertumbuhan perusahaan-perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan semakin besar. Para pekerjapun akan mengalami peningkatan pendapatan. Dalam kondisi seperti ini, penerimaan negara dari perpajakan akan dapat dipacu

peningkatannya. Penerimaan pajak digunakan meliputi dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Definisi pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Provinsi dan**  
**Pemerintah Kabupaten/Kota**

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Air Permukaan	4. Pajak Reklame
5. Pajak Rokok	5. Pajak Penerangan Jalan
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	7. Pajak Parkir
	8. Pajak Air Tanah
	9. Pajak Sarang Burung Walet
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber : UU No 28 Tahun 2009

Berdasarkan Tabel 1.1 ada lima jenis pajak yang dikelola oleh Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak yang dikelola Kabupaten/Kota ada sebelas yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Setiap provinsi atau daerah diijinkan untuk tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan apabila potensi pajak di daerah atau provinsi tersebut dipandang kurang memadai. Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan dengan undang-undang ini, daerah kabupaten/kota diberikan peluang menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan

retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sejalan perkembangan perekonomian yang disertai dengan meningkatnya sarana dan prasana pemerintahan maka semakin meningkat pula pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Begitu juga halnya dengan pemerintah daerah Provinsi NTT. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber penerimaan atau pendapatan.

Adapun perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah menurut jenisnya di Provinsi NTT tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Berikut ini adalah data realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenisnya di Provinsi NTT tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pada tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut jenisnya Di Provinsi NTT Tahun 2013-2015**

Jenis Pajak	TA 2013			TA 2014			TA 2015		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %
PKB	105.914.435.000	98.236.368.104	92,75	114.529.075.224	111.853.669.867	97,66	119.735.024.700	118.766.069.203	99,19
BBNKB	132.188.354.000	164.481.895.340	124,43	144.046.044.000	175.358.452.975	121,74	171.000.000.000	164.493.263.802	96,19
PBBKB	85.000.000.000	101.249.302.267	119,12	107.500.000.000	126.039.827.359	117,25	127.000.000.000	141.254.645.670	111,22
PAJAK ROKOK	-	-	-	182.600.000.000	146.561.605.391	80,26	240.741.092.300	237.283.476.001	98,56

Sumber: BPPKAD Provonsi NTT (Data Diolah)

Pada tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan Pajak BBNKB dan PBBKB selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun anggaran 2013-2015, realisasi penerimaan pajak BBNKB melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan, tetapi pada presentase penerimaan dari pajak BBNKB dan PBBKB mengalami penurunan tiap tahunnya.

Pada tahun 2013, presentase realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 92,47% atau Rp.97.337.481.839 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 105.264.587.000, selanjutnya pada tahun 2014 presentase realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar 97,22% atau Rp.111.340.862.561, namun realisasi penerimaan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp.114.529075.224, dan untuk tahun 2015 presentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar 99,33% atau Rp.118.936.789.553, namun realisasi penerimaan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp.119.735.024.700. Meskipun pajak kendaraan bermotor memiliki presentase penerimaan lebih rendah dibandingkan dengan pajak bea balik nama dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, namun Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi, karena adanya penambahan jumlah pembelian kendaraan bermotor tiap tahunnya.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT sebagai organisasi sektor publik yang mengelola pendapatan asli daerah

yang merupakan bagian dari pendapatan daerah. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi NTT disajikan pada Tabel 1.3 berikut ini :

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan**  
**Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT**  
**Tahun 2013-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak kendaraan Bermotor (PKB) (Rp)</b>	<b>Kontribusi PKB Terhadap PAD (%)</b>
2013	523.291.203.067	97.337.481.839	18,60
2014	763.300.806.702	111.340.862.561	14,58
2015	882.315.240.378	118.936.789.553	13,48

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi NTT. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2013, dimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi NTT mencapai 18,60%. Sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 dimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi NTT hanya sebesar 13,48%.

Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan produksi dan jumlah kendaraan bermotor. Jadi dapat dikatakan hampir setiap satu keluarga bisa memiliki lebih dari 1 motor, karena jumlah kendaraan bermotor yang bertambah meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor per jenis kendaraan sepeda motor, scooter, roda tiga pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2013-2015.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Per Jenis Kendaraan Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga di Provinsi NTT Tahun 2013-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor Unit</b>
2013	404.516
2014	461.641
2015	504.442

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4, dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebanyak 404.516 unit kendaraan bermotor, selanjutnya pada tahun 2014-2015 jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebanyak 461.641 unit pada tahun 2014 dan untuk tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 504.442 unit. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, jumlah kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh pendapatan suatu daerah. Berikut ini adalah data Pendapatan per kapita di Provinsi NTT tahun 2013-2015.

**Tabel 1.5**  
**Rata-rata Pendapatan per kapita Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi NTT Tahun 2013-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Perkapita Rp</b>
2013	2.97.491
2014	2.665.925
2015	3.032.185

Sumber :BPS Provinsi NTT (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.5, diketahui bahwa Pendapatan per kapita Provinsi NTT mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pendapatan Per kapita sebesar Rp.2.579.491, selanjutnya pada tahun 2014 pendapatan per kapita sebesar Rp.2.665.925 dan pada tahun 2015 pendapatan



per kapita mengalami peningkatan sebesar Rp.3.032.185 . Dalam kurun tiga tahun terakhir, Pendapatan per kapita Provinsi NTT masih merupakan pendapatan yang menjadi andalan terbesar di Propinsi NTT. Selain pendapatan, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga dipengaruhi jumlah penduduk. Berikut ini adalah data jumlah penduduk di Provinsi NTT tahun 2013-2015.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Berkerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama di Provinsi NTT Tahun 2013-2015**

Tahun	Jumlah Penduduk Jiwa
2013	2.104.07
2014	2.174.228
2015	2.219.291

Sumber : BPS Provinsi NTT (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.6, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2013 sebanyak 2.104.507 jiwa, selanjutnya pada tahun 2014 sebanyak 2.174.228 jiwa dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 2.219.291 jiwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal-hal tersebut diatas dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2015.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan jumlah kendaraan bermotor, pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT ?
2. Apakah jumlah kendaraan bermotor, Pendapatan Per kapita, dan jumlah penduduk secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT ?
3. Apakah jumlah kendaraan bermotor, Pendapatan Per kapita, dan jumlah penduduk secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan jumlah kendaraan bermotor, pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kabupate/kota di Provinsi NTT.
2. Menganalisa jumlah kendaraan bermotor, Pendapatan Per kapita, dan jumlah penduduk secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

3. Menganalisa jumlah kendaraan bermotor, Pendapatan Per kapita, dan jumlah penduduk secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dikemukakan, penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Program Studi Akuntansi Konsentrasi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai rujukan dan pengembangan lebih lanjut.
2. Bagi Pemerintah Provinsi, dengan mengetahui pengaruh masing-masing faktor yang mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor dapat digunakan sebagai informasi dalam perumusan kebijakan peningkatan penerimaan pajak daerah.